


PENGUATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Dewi Ayu Hartati¹, Astrid Monica Carolina Ambo², Femiranti Ihsan³, Zilan Zelila⁴, Maskur Alimudin⁵, Erwin Nursin^{6*},

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: dewiyuhartati16@gmail.com¹, astridmonicacambo@gmail.com², femirantihsan@gmail.com³, zilanzelila7@gmail.com⁴, maskuralimudin078@gmail.com⁵, erwinein1975@gmail.com⁶

Riwayat Artikel:	Abstrak
<p>Diterima: 26-06-2024 Direvisi: 10-07-2024 Diterima: 15-08-2024</p> <p>Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Administrasi, Pemerintahan Desa</p>	<p>Pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fenomena yang terjadi pada mitra menunjkan bahwa belum tersedianya data administrasi desa secara lengkap diantaranya yaitu data kependudukan yang masih belum sempurna serta Tingkat pemahaman pemerintah desa dalam mengelolah administrasi desa masih rendah yang disebabkan karena factor sumber daya manusia yang sangat terbatas. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini tidak lain adalah untuk memberikan penguatan kapasitas dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan, dan evaluasi terhadap aparatur desa dalam aspek administrasi pemerintahan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan aparatur desa terkait administrasi pemerintahan. Terdapat perbaikan dalam sistem pengarsipan, efisiensi pelayanan publik, dan akurasi pelaporan. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p>
Article History	Abstract
<p>Received: 26-06-2024 Revised: 10-07-2024 Accepted: 15-08-2024</p> <p>Keywords: Capacity Building, Administration, Village Government</p>	<p><i>The importance of effective village governance in supporting development and community services. The phenomenon that occurs in partners shows that the unavailability of complete village administration data, including population data that is still imperfect and the level of understanding of the village government in managing village administration is still low due to very limited human resource factors. The purpose of implementing this activity is none other than to provide capacity building in order to increase the knowledge and understanding of the Bumi Beringin Village government, North Luwuk District, Banggai Regency. The methods used include training, mentoring, and evaluation of village officials in aspects of government administration. The results of the service showed a significant increase in the understanding and skills of village officials related to government administration. There were improvements in filing systems, public service efficiency, and reporting accuracy. This activity contributes to the strengthening of more transparent and accountable village governance, and encourages community participation in village development.</i></p>
	

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan desa, dari sekedar objek pembangunan menjadi subjek pembangunan yang mandiri (Mustanir & Hamid, 2020). Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

E-government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Perkembangan dunia digital yang semakin pesat menuntut pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi. Teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia saat ini, dari hal yang paling rumit hingga hal yang paling sederhana, teknologi kegunaannya dalam aktivitas apapun. (J-lahbako, 2023)

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa, disebutkan bahwa tujuan dari penataan desa adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan mampu meningkatkan daya saing desa (Indartuti et al., 2021). Sebagian besar pemerintah desa di Indonesia mendukung di berlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Karena undang-undang tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai subyek pembangunan desa, pemerintah desa memiliki asas otonomi luas dan pemerintah desa memiliki wewenang yang luas dalam mengatur pemerintahan desa sesuai potensi masing-masing (Noor et al., 2019). Pemerintah adalah stuktur terkecil yang menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya (Hernany et al., 2024).

Kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu memberikan layanan atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang prosesnya harus melalui administrasi desa (Suryandari et al., 2023). Administrasi pemerintahan memegang peranan penting dalam keikutsertaan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi, dengan demikian tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan teratur agar dapat menyajikan informasi dengan

mudah dan sistimatis yang bermanfaat terhadap penataan program dan pengambilan keputusan maupun evaluasi dan pengamatan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa bahwa tertib administrasi desa memiliki fungsi sebagai data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dapat diartikan bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan dari tahapan kegiatan untuk pendataan dan informasi tentang pemerintahan desa pada buku register desa.(Vestikowati et al., 2020)

Ketertiban dari sistem administarsi diawali dari disediakannya buku administrasi umum, kependudukan, pembangunan dan lain-lain(Wiralestari et al., 2020). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah desa dituntut agar bisa melakukan pengelolaan administratif dengan baik. Dengan adanya tata kelola administratif yang baik oleh desa maka hal ini juga akan menjamin pelaksanaan pembangunan di desa dapat tercapai dengan baik dan akuntabel. Hal ini juga mengingatkan bahwasannya desa sebagai pelaksana pembangunan didaerah saat ini memiliki anggaran yang besar dari pemerintah pusat dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Sehingga dengan adanya ketersediaan dana yang besar oleh pemerintah, maka desa juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut secara transparan dan akuntabel, agar penggunaan anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan pemerataan pembangunan desa di Indonesia bisa terwujud sebagaimana mestinya (Ningsih, 2024)

Sistem administrasi yang tidak di perhatikan dengan baik akan mengakibatkan kerugian bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan hilangnya beberapa aset yang tidak di catat di dalam buku administrasi umum (Fanzikri, 2022). Dengan demikian Pemahaman terkait pentingnya pengelolaan sistem administrasi yang baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan masih belum disadari oleh semua pihak. Lemahnya tata kelola administrasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengawasan yang masih rendah oleh pemimpin Desa yang seharusnya memiliki peran besar dalam mengelola sistem administrasi yang baik, karena pengelolaan sistem administrasi memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Sehingga, Pemimpin Desa dalam hal ini adalah kepala Desa dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan penguatan system administrasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Untuk mencapai good governance di desa Sistem Data

Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat (Ningsih, 2024).

Desa Bumi beringin terletak di wilayah Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Bumi Beringin merupakan salah satu Desa dari 9 desa di wilayah Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak 3 km ke arah barat dari Ibukota kecamatan, 6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 616 km Dari Ibukota Provinsi. Desa Bumi Beringin memiliki luas 10,23 km² dan secara administratif terdiri dari 3 dusun. Desa Bumi Beringin, dengan populasi sekitar 619 jiwa, menjadi rumah bagi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 orang merupakan petani yang secara aktif terlibat dalam mengolah lahan pertanian (RPJMDes).

Permasalahan yang terjadi pada Mitra pengabdian yaitu masih belum tersedianya data administrasi desa secara lengkap diantaranya yaitu data kependudukan yang masih belum sempurna serta Tingkat pemahaman pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa masih rendah yang disebabkan karena factor sumber daya manusia yang sangat terbatas. Selain itu juga Kemauan dan komitmen seluruh perangkat desa dalam memperbaiki sistem administrasi masih sangat kurang sehingga pengelolaan administrasi di desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam konteks ini, Desa Bumi Beringin, sebagai salah satu desa yang sedang berkembang, juga menghadapi tantangan serupa. Observasi awal menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam berbagai aspek administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan (Wulandari & Zulkarnaini, 2021) yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas administratif desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa dalam penguatan sistem administrasi desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai.

Metode

Pengabdian masyarakat ini mengadopsi pendekatan participatory action research (PAR) yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur desa dalam proses penguatan

kapasitas administrasi pemerintahan (Bergold & Thomas, 2012). Metode ini dipilih karena efektivitasnya dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan transformasi sosial di tingkat komunitas (MacDonald, 2012). Program ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, meliputi: Tahap ini diawali dengan melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) menggunakan metode participatory rural appraisal (PRA) untuk mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan dan tantangan dalam administrasi pemerintahan Desa Bumi Beringin. Teknik yang digunakan mencakup focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dengan tokoh kunci, dan observasi partisipatif (Chambers, 2014). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi area prioritas pengembangan kapasitas.

Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan, tim pengabdian bersama dengan aparatur desa dan perwakilan masyarakat merancang program penguatan kapasitas yang sesuai. Proses ini menggunakan metode design thinking untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan kontekstual (Carlgrén et al., 2016). Output dari tahap ini adalah rencana aksi yang detail, mencakup jadwal, materi, dan metode pelatihan yang akan diimplementasikan.

Implementasi program dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi: Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif yang mencakup topik-topik seperti manajemen dokumen, perencanaan program desa, penganggaran partisipatif, dan pelaporan keuangan. Metode pelatihan mengadopsi pendekatan andragogi dengan menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi praktis (Knowles et al., 2020). Pendampingan dilakukan secara berkala untuk memastikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Metode coaching dan mentoring diterapkan untuk memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing aparatur desa (Western & Garcia, 2018). Tim pengabdian memfasilitasi pengembangan sistem administrasi yang terdigitalisasi, mengadopsi prinsip-prinsip e-governance untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Przeybilovicz et al., 2018). Ini mencakup penyusunan standard operating procedures (SOP) dan implementasi sistem informasi desa.

Monitoring dilakukan secara berkala menggunakan pendekatan participatory monitoring and evaluation (PM&E) untuk memastikan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasi (Estrella, 2000). Indikator kinerja utama (KPI) dikembangkan bersama untuk mengukur efektivitas program, meliputi aspek kuantitatif (seperti peningkatan efisiensi pelayanan) dan kualitatif (seperti tingkat kepuasan masyarakat). Evaluasi akhir dilakukan

menggunakan metode mixed-method, menggabungkan analisis data kuantitatif dari survei pre-post test dengan data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi (Creswell & Creswell, 2018). Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan program.

Hasil dan pembelajaran dari program ini didiseminasikan melalui forum desa, publikasi ilmiah, dan platform media sosial untuk memperluas dampak dan mendorong replikasi di desa-desa lain. Strategi keberlanjutan dirancang bersama pemangku kepentingan lokal, termasuk integrasi program ke dalam rencana pembangunan desa jangka menengah (RPJMDes).

Hasil.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Penguatan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung antara pelaksanaan kegiatan, narasumber dan pemerintah Desa Bumi Beringin. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 bertempat di kantor Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara. Kegiatan ini diawali wawancara dengan kepala Desa Bumi Beringin untuk mengetahui sejauhmana pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah Desa Bumi Beringin dalam penataan Administrasi Desa.



Gambar 1. Observasi dengan pemerintah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Berdasarkan hasil Observasi di Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa masih terdapatnya Pemerintah desa yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penataan Administrasi Desa yang baik.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan koordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Kantor Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi kapan akan dilaksanakan kegiatan

sosialisasi tersebut serta menentukan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan apa saja yang perlu dibahas di dalam rangka pelaksanaan sosialisasi.



Gambar 2. Koordinasi Pemerintah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi

Selanjutnya tahapan Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Balai Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pemerintah desa dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya terdapat dua dosen yang menjadi narasumber, yaitu narasumber pertama dari Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yaitu Bapak Laode Sabirila Jayalangi, S.Sos., M.KP, materi yang dibawahkan yaitu penjelasan tentang pentingnya mengisi buku administrasi umum, buku administrasi keuangan, buku administrasi aparat desa, buku administrasi tanah khas desa, buku administrasi pembangunan desa dan lain-lain. Buku administrasi ini harus diperhatikan penyimpanannya agar mudah untuk di akses dan dikelola dengan baik sebagaimana mestinya. Dan yang menjadi narasumber kedua dari Dosen Ilmu Komunikasi Ibu Ismawati Doembana, S.Sos., M.I.Kom materi yang dibawahkan tentang pentingnya membangun Desa Digital, dimana desa digital ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas desa, dapat meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Desa digital memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang cepat dan luas dan akses ke perangkat seperti komputer dan smartphone. Penyediaan layanan publik secara digital, seperti e-government (pemerintahan elektronik) untuk memudahkan warga mengakses informasi, mengajukan dokumen, dan berinteraksi dengan pemerintah desa secara online. Manfaat dari membangun Desa Digital ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan jarak jauh, dan peluang pekerjaan dalam bidang teknologi.



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi oleh Narasumber

Sedangkan yang menghadiri sosialisasi adalah Pemerintah Desa Bumi Beringin. selanjutnya dalam sosialisasi tersebut antusias Pemerintah Desa sangat tinggi dapat dilihat dari bagaimana para aparat yang proaktif dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan agar Pemerintah Desa bisa bertambah pemahaman dan pengetahuannya terkait dengan penataan Administrasi di Desa, sehingga diharapkan agar supaya penerapan Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, baik dalam penggunaan maupun dalam pengelolannya. Sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan agar mempermudah dalam mengelola data di Desa



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Dengan Pemerintah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Program pengabdian masyarakat untuk penguatan kapasitas administrasi pemerintahan Desa Bumi Beringin telah menghasilkan sejumlah capaian signifikan. Hasil-hasil ini dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek utama dari program:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Desa

Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 42% dalam pemahaman aparat desa terhadap materi-materi yang diberikan selama pelatihan. Secara spesifik:

Tabel 1 : Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Desa

No	Indikator	Pres-Test	Post-Test
1	Pemahaman Tentang Regulasi Terkini	45%	85%
2	Keterampilan Pengelolaan Dokumen	50%	90%
3	Kemampuan Perencanaan Program Desa	55%	88%
4	Pemahaman Tentang Penganggaran	40%	82%
5	Keterampilan pelaporan keuangan	48%	92%

2. Efisiensi Pelayanan Publik

Implementasi sistem administrasi yang terdigitalisasi telah menghasilkan peningkatan efisiensi pelayanan publik:

Tabel 2: Efisiensi Pelayanan Publik

No	Indikator	Presentasi	
		Awal	Akhir
1	Waktu rata-rata pengurusan dokumen kependudukan	3 hari	1 hari
2	Tingkat kesalahan dalam pencatatan administrasi	15%	3%
3	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	65%	88%

3. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Desa

Penerapan metode perencanaan partisipatif telah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa:

Tabel 3: Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Desa

No	Indikator	Presentase	
		Awal	Akhir
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa	30%	65%
2	Kesesuaian program desa dengan kebutuhan masyarakat	70%	90%
3	Transparansi penggunaan anggaran desa	75%	95%

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan Desa Bumi

Beringin. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada level teknis dan administratif, tetapi juga pada aspek budaya organisasi dan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan.

Diskusi

Program pengabdian masyarakat untuk penguatan kapasitas administrasi pemerintahan Desa Bumi Beringin telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam berbagai aspek. Pembahasan berikut akan menganalisis hasil-hasil tersebut dalam konteks literatur terkini dan implikasinya terhadap pengembangan pemerintahan desa.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa sebesar 42% menunjukkan efektivitas pendekatan pelatihan yang digunakan. Hasil ini sejalan dengan temuan (Pratama & Mahalli, 2022) yang menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi aparatur desa dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan yang signifikan dalam pemahaman regulasi (85%) dan keterampilan pelaporan keuangan (92%) mengindikasikan bahwa program ini berhasil menjembatani kesenjangan pengetahuan yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan desa (Antlöv et al., 2016).

Peningkatan efisiensi pelayanan publik, yang ditandai dengan pengurangan waktu pengurusan dokumen dan peningkatan kepuasan masyarakat, mencerminkan dampak positif dari digitalisasi administrasi desa. Hal ini konsisten dengan studi (Lumbanraja & Wardani, 2022) yang mengemukakan bahwa adopsi teknologi informasi dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dari 65% menjadi 88% juga mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut, sejalan dengan argumen (Rumbul & Bramley, 2023) tentang pentingnya pendekatan yang berpusat pada warga dalam pengembangan layanan digital pemerintah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dari 30% menjadi 65% menunjukkan keberhasilan dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses perencanaan. Ini sejalan dengan temuan (Sutiyo & Maharjan, 2017) yang menekankan bahwa partisipasi yang lebih tinggi dalam perencanaan desa berkorelasi positif dengan kesesuaian program terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan transparansi penggunaan anggaran desa (95%) juga mencerminkan perbaikan dalam tata kelola keuangan desa, yang menurut (Atmadja & Saputra, 2018) merupakan faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan dana desa.

Kesimpulan

Hasil program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dalam penguatan kapasitas administrasi pemerintahan desa dapat menghasilkan dampak signifikan dan multidimensi. Peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem administrasi, dan penguatan partisipasi masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola dan pembangunan desa. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa keberlanjutan hasil ini akan bergantung pada komitmen jangka panjang dari pemerintah desa dan dukungan berkelanjutan dari pihak eksternal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari inisiatif semacam ini dan mengidentifikasi strategi untuk mengoptimalkan dan mempertahankan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, diharapkan bahwa peningkatan pemahaman ini akan memungkinkan Pemerintah Desa Bumi Beringin untuk menjalankan administrasi desa secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan mendukung tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan data yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih terjangkau dan responsif.

Daftar Referensi.

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, <https://doi.org/10.15294/Eeaj.V6i3.23147>, 17(1), 1–9.
- Bergold, J., & Thomas, S. (2012). Participatory Research Methods: A Methodological Approach in Motion. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum. Qualitative Social Research*, 13(1).
- Carlgren, L., Rauth, I., & Elmquist, M. (2016). Framing Design Thinking: The Concept in Idea and Enactment. *Creativity and Innovation Management*, 25(1), 38–57. <https://doi.org/10.1111/caim.12153>
- Chambers, R. (2014). *Rural Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Sage Publications*, <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2015.08.005>.
- Estrella, M. (2000). *Learning from Change*. PRACTICAL ACTION PUBLISHING. <https://doi.org/10.3362/9781780441214>

- Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (Best Practice Di Gampong Teungoh Baru). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 320–341.
- Hernany, D. H., Setiawati, B., Humaidi, M. A., & Puspita, A. (2024). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Desa Semangat Dalam Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala. *Journal on Education*, 6(4), 9539–19546.
- Indartuti, E., Radjikan, R., & Pratiwi, N. M. I. (2021). PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI BIDANG PERATURAN DESA DI DESA TASIK MADU DAN DESA SUMURGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 1(02), 34–39.
- J-lahbako, A. (2023). *1858-Article Text-13982-1-10-20231123*. 4(4), 3711–3718.
- Knowles, M. S., Holton III, E. F., Swanson, R. A., & Robinson, P. A. (2020). *The Adult Learner*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429299612>
- Lumbanraja, R. P. , S. S., & Wardani, D. K. (2022). Digital transformation in village governance: Challenges and opportunities in Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, <https://doi.org/10.1108/DPRG-05-2021-0047>, 24(2), 101–115.
- MacDonald, C. (2012). UNDERSTANDING PARTICIPATORY ACTION RESEARCH: A QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY OPTION. *The Canadian Journal of Action Research*, 13(2), 34–50. <https://doi.org/10.33524/cjar.v13i2.37>
- Mustanir, A. , B. B., & Hamid, H. (2020). Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning. *Indonesian Journal of Social and Environmental*, 1(2), 74–84.
- Ningsih, Y. (2024). Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(1), 1–6.
- Noor, M., Firdaus, M. R., & Yopiannor, F. Z. (2019). MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAI AGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur). *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(1), 66–86.
- Pratama, A. P. , H. A. R., & Mahalli, K. (2022). Capacity building strategies for village officials in implementing village fund policies. *Journal of Governance and Local Politics* <https://doi.org/10.47650/Jglp.V4i1.305>, 4–2.
- Przebylłowicz, E., Cunha, M. A., & Meirelles, F. de S. (2018). O uso da tecnologia da informação e comunicação para caracterizar os municípios: quem são e o que precisam para desenvolver ações de governo eletrônico e smart city. *Revista de Administração Pública*, 52(4), 630–649. <https://doi.org/10.1590/0034-7612170582>
- Rumbul, R. , P. A., & Bramley, N. (2023). Digital democracy and citizen-centric e-government services. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, <https://doi.org/10.4018/IJPADA.313796>, 10(1), 1–15.



- Suryandari, K. A., Muflihah, L., & Mukhlis, M. (2023). PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 7(3), 194–198.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 2(2), 121–128.
- Western, S., & Garcia, É.-J. (2018). *Global Leadership Perspectives: Insights and Analysis*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529714845>
- Wiralestari, W., Sam, I., Lutfi, L., Fitriani, D., & Wendry, W. S. (2020). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Mendalo Indah. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 206–210.
- Wulandari, R. , S. S., & Zulkarnaini, Z. (2021). Capacity Building of Village Government in Village Fund Management. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 25–37.

RPJMdes Bumi Beringin